

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan secara umum dapat didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan masyarakat.^{1 2} Secara tegas tujuan pendidikan Nasional tersebut telah mengkomunikasikan harapan yang tinggi tentang peradaban manusia yang tentu akan lebih baik, yang dihasilkan dari berjalannya proses pendidikan tersebut. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi dengan pendidikan di Indonesia? Pendidikan ternyata belum menjadi kekuatan mendasar bagi kemajuan bangsa. Ada hal yang masih belum maksimal di sentuh dalam proses pendidikan di bangsa ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Juwono Sudarsono melihat bahwa.

Belakangan ini, berbagai masalah pendidikan nasional sering menjadi bulan-bulanan kritik di masyarakat. Mengapa pendidikan di Indonesia tidak menghasilkan pribadi-pribadi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, akhlak dan kemanusiaan? Kita melihat sendi-sendi kehidupan bangsa saat ini tengah digoyang berbagai macam aksi kekerasan, kerusuhan, anarki, korupsi, vandalisme, dan tindakan-tindakan amoral. Bangsa Indonesia tampaknya tengah terkena kontaminasi "virus" disintegrasi sosial, budaya dan keagamaan. Banyak kalangan melihat bahwa model pendidikan di bangsa ini kurang berbasis pada kemanusiaan, sehingga anak-anak didik dan produk pendidikan di Indonesia rentan konflik kemanusiaan dan integrasi sosial budaya. Munculnya berbagai konflik, khaos, dan ketegangan sosial dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat menunjukkan indikasi adanya kesalahan-kesalahan mendasar dalam filosofi dan manajemen pendidikan di Indonesia."

Kenyataan tersebut sungguh ⁴"wajah" yang sangat memprihatinkan dari pendidikan di bangsa ini. Tujuan Pendidikan Nasional sepertinya sedang stagnan hanya pada satu sisi yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi bangsa, padahal masih sekian banyak arah pendidikan yang harus dibangun dan diberdayakan secara maksimal sebagai dasar dari pertumbuhan ekonomi bangsa yang lebih baik. Arah pendidikan yang tidak membangun kesadaran kritis tentang diri peserta didik,

howono Sudarsono, dalam "Pendidikan, Kemanusiaan dan Peradaban", lihat, Soedijarto, **Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita**, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. xvii.

² Ibid.,

terhadap lingkungan dan harapan bagi terciptanya perubahan ke arah yang baik, yang berdasar pada keterkaitan antara pengetahuan dan tindakan praktis, bukanlah makna dari hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Karena itulah “Nietsche, mengatakan bahwa, “pendidikan tinggi dan untuk sejumlah besar siswa adalah pertentangan istilah” yang oleh Bertrand Russel (1872-1970) disimpulkannya dalam *skeptical essay* yaitu, “kini kita diperhadapkan pada sebuah fakta paradoksal, bahwa pendidikan menjadi salah satu kendala utama bagi usaha mencapai kecerdasan serta kebebasan berpikir”.³

Pendidikan seharusnya dijadikan instrumen humanisasi dan sistem yang dijalankan adalah sistem yang akan menghasilkan individu yang tidak terasing dari diri dan dunianya.⁴ Hal senada juga diperjuangkan oleh Fuad Hasan, dengan menegaskan bahwa,

Pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia. Pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa bagi terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skill*), tapi juga pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values and social norms*). Kiranya dapat kita sepakati, tiap masyarakat sebagai pengemban budaya (*culture bearer*) berkepentingan untuk memelihara ketejalinan antara berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya. Tiap ikhtiar pendidikan bermakna sebagai proses pembudayaan dan seiring bersama itu berkembanglah sejarah peradaban manusia. Pendidikan harus merupakan ikhtiar yang jauh melampaui terpenuhinya kebutuhan sesaat-sesaat. Pendidikan harus tetap mengunggulkan derajat dan martabat manusia. Kesadaran ini harus senantiasa disegarkan, mengingat makin meningkatnya dominasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang menurut Jacques Ellul sudah bergerak maju sebagai sebagai *autonomoiiis foree* akhirnya melanda manusia dan kemanusiaan hingga menyerah pada dominasi teknologi. Apa yang disebut teknokrasi menunjukkan betapa *technos* (peralatan) makin tampil sebagai *kratos* (kekuatan).⁵

Maka dari itu, pendidikan sudah seharusnya dibangun dalam konsep bahwa manusia sebagai *homo potens*, yaitu manusia sudah sejak lahir membawa potensi

³Paulo Freire, Ivan 111 ich & Erich Fromm, dkk, **Menggugat Pendidikan; Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. xxviii

⁴Dikutip dari: Syaiful Bahri, **Konsep Pendidikan Freire dan Revolusi Kesadaran**, <http://sip2blofspot.com/2008/05/konseppendidikan-freiredanrevolusi/> posting Sabtu, 10 Mei 2008, diakses: 10-04-2010.

⁵Fuad Hassan, “Pendidikan adalah Pembudayaan” dalam **Pendidikan Manusia Indonesia*** (Jakarta: Penerbit Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra, 2004), 55,65.

dan bakat di dalam dirinya, tetapi potensi dan bakat tersebut tidak serta merta berkembang secara maksimal tanpa didukung oleh pemberdayaan melalui proses pendidikan. Itu berarti bahwa pendidikan pada intinya harus membangun pendidikan yang bersifat humanis, membangun keberpihakan kepada jati diri manusia. Pendidikan humanis dapat dipahami sebagai model pendidikan yang memuliakan manusia atas potensi-potensi kemanusiaan yang sudah ada dalam dirinya, yaitu manusia sebagai *homo potens*. Pada model pendidikan ini, manusia dipandang sebagai subyek yang otonom, sehingga pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan bukan pada pendidik. Selama tujuan pendidikan adalah untuk mengenalkan peserta didik terhadap realitas yang ada di sekitarnya dan menyadarkan mereka akan proses dehumanisasi yang terjadi atasnya, maka peserta didik harusnya tidak lagi dijejali dengan hapalan teori melainkan dengan membawa mereka pada realitas itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan harus didasarkan atas pengakuan kultur dan membangun manusia pada kulturnya istilah tersebut juga sama seperti yang dikatakan oleh Daoed Joesoef, bahwa,

Pendidikan dilakukan dalam rangka membangun kultur yang dipergunakan guna mengimbangi natur. Kultur adalah sistem nilai yang dihayati oleh manusia. Di antara semua nilai yang ditangani oleh pendidikan, semakin lama semakin jelas signifikansi suatu nilai, tidak hanya bagi kemampuan survival manusia di masa depan, tetapi lebih-lebih demi kemampuan manusia untuk membuat sendiri 'masa depannya', yaitu "tempat" di mana kita semua akan menjalani sisa hidup kita. Nilai yang satu ini adalah ilmu pengetahuan, yang pada dasarnya adalah pengorganisasian pengetahuan kita begitu rupa hingga ia lebih menguasai lagi potensi/misteri yang tersembunyi di dalam natur.⁶

Dunia pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia saat ini membutuhkan sebuah konsep dan strategi yang integral yang bisa "mendidik" seluruh aspek kemanusiaan manusia dalam menghadapi tantangan arus budaya dan sosial yang demikian gencar karena perkembangan teknologi informasi yang sangat

⁶ Daoed Joesoef, dalam "Signifikansi Pendidikan bagi Mahkluk Manusia", lihat: Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. xxvii.

cepat.⁷ Gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural adalah jawaban atas beberapa problematika kemajemukan itu. Perlu disadari bahwa, proses pendidikan adalah proses pembudayaan dan cita-cita, dan cita-cita persatuan bangsa merupakan unsure budaya nasional.⁸ Syafiq A. Mughni menegaskan bahwa, “sesungguhnya, pada level nasional, berakhirnya sentralitas kekuasaan pada masa Orde Baru memaksakan “monokulturalisme” yang nyaris seragam telah memunculkan reaksi balik, yang bukannya tidak mengandung sejumlah implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural”.⁹

“Sejarah Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa, mulai pertengahan dekade 90-an sampai awal decade 2000-an. bangsa ini disuguhi aneka tragedi kemanusiaan bernuansa SARA. Tragedi kemanusiaan dan anlaragaman di Poso, Sambas, Banyuwangi, Situbondo, Madura, Papua, Sampit, Aceh dan Ambon, semua itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa dalam lingkaran sosial bangsa Indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentrisnya. Hal tersebut menjadi bukti betapa rapuhnya konstruksi kebangsaan berbasis multikulturalisme di Negara Indonesia ini.”

Lalu, apa yang sesungguhnya sedang dilakukan pemerintah dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional tersebut? Akankah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjawab kondisi mendasar dari bangsa ini yang multikulturalis yang amat kondusif bagi munculnya konflik dalam berbagai dimensi kehidupan, baik konflik vertikal maupun horizontal. Erman Supamo menegaskan bahwa.

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional, apabila diamati dari kondisi riil yang ada, terlihat bahwa adanya ketimpangan antara kebijakan yang diharapkan dan hasil yang dicapai dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM. Padahal kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sebagai saran untuk mencerdasakna kehiduan bangsa memiliki peran yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan Sumber

⁷Juwono Sudarsono, dalam "Pendidikan, Kemanusiaan dan Peradaban", lihat, Soedijarto, **Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita**, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. xx.

⁸ Choirul Mahfud, **Pendidikan Multikultural**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. viii.

⁹ Syafiq A. **Mughni**, "**Pendidikan BerbasisMultikulturalisme**", lihat dalain: Choirul Mahfud, **Pendidikan Multikultural**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. ix

daya Manusia (SDM) yang bermutu dengan indikator berkualifikasi ahli, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki *attitude* (sikap dan perilaku yang positif)¹⁰

Bercermin dari keberadaan pendidikan di Indonesia yang dikemas dalam sistem pendidikan Nasional tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan di Indonesia sampai sekarang ini pun, ternyata masih “didominasi” paham keseragaman, meskipun sedang berada ditengah gencar-gencarnya isu demokrasi di bangsa ini ditegakkan. Rupanya pilihan berdemokrasi di bangsa ini masih belum jujur dan tulus menembus ranah pendidikan. Salah satu produk unggulan domestifikasi dalam wujud keseragaman adalah pelaksanaan UN (ujian Nasional). “Bukankah makin merata “keseragaman” serta bahan-bahannya, makin santer terdengar gugatan tentang keseragaman hasil pendidikan itu.”¹¹ Inilah contoh kasus yang sangat mendesak yang perlu ditinjau dan diselesaikan adalah pelaksanaan Ujian Nasional yang sama sekali tidak memberi ruang terhadap penanaman prinsip-prinsip demokratisasi dan multikulturaslisasi pendidikan di Indonesia.

Di tahun 1968, di era kepemimpinan Menteri Pendidikan, dari Menteri Mashuri, Menteri Socmantri Brojonegoro, Menteri Sjarif Thayeb, Menteri Nugroho Notosusanto, Indonesia sama sekali tidak menerapkan Ujian Nasional (UN), namun pada tahun 1981, saat Daoed Yusuf sebagai staf ahli Menteri Pendidikan, hendak menerapkan Ujian Nasional. Yang kemudian dalam memo yang ditulis oleh Prof. Dr. Soedijarto, M.A kepada Daoed Yusuf, disarankan agar tidak menerapkan Ujian Nasional. Alasannya karena berdasarkan riset, Bloom, diketahui bahwa, “tingkah laku belajar peserta didik, dipengaruhi oleh perkiraan peserta didik tentang apa yang akan dinilai atau diujikan.”¹²

Menurut Seto Mulyadi, belajarnya peserta didik untuk menghadapi UN yang semata karena takut dihukum ini merupakan bentuk lain kekerasan terhadap anak.¹³

¹⁰ Erman Suparno, dalam "Pendidikan Berperan dalam Proses Pembudayaan Kemampuan, Sikap, dan Nilai Manusia Indonesia Baru", lihat, Soedijarto, ***Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita***, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. xxiii.

¹¹ Paulo Freire, Ivan Illich & Erich fromm, dkk, ***Op.cil***, p. xxviii

¹² Soedijarto, ***Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita***, (Jakarta: KOMPAS, 2008), hlm.

153.

¹³ ***Presiden Minta Mendiknas Naik Banding Soal Kasus Ujian Nasional***, <http://www.antara.co.id/arc/2007/5/22/22/05/2010>.

Hukuman yang dimaksud tentunya adalah stempel ‘tidak lulus’ dan ‘tidak dapat ijazah’. Terlebih lagi, berbagai tekanan terhadap peserta didik yang berlebihan tersebut dapat mengakibatkan peserta didik mengalami depresi berat¹⁴ bahkan sampai ada yang meninggal dunia.¹⁵ Ditemui juga puluhan kasus peserta didik yang melakukan percobaan bunuh diri karena tidak lulus UN, ada yang gagal, namun tidak sedikit juga yang berhasil.¹⁶ Namun tekanan tersebut lebih banyak mengakibatkan peserta didik menjadi menghalalkan segala cara agar lulus UN dengan melakukan kecurangan saat UN hingga melakukan jual beli jawaban.¹⁷

Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik melalui UN adalah praktek pengabaian kecerdasan afektif dan psikomotorik yang dimiliki oleh peserta didik. UN jelas-jelas bertentangan dengan konsep kompetensi lulusan yang mencakup unsur afektif dan psikomotorik, selain unsur kognitif dalam konstitusi.¹⁸ Padahal menurut Bloom, fungsi dari masing-masing aspek kecerdasan tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.¹⁹ Bila seorang peserta didik yang tidak lulus UN dianggap ‘tidak cerdas’ secara kognitif, maka hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap keutuhan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh manusia.

Bangsa ini membutuhkan kesungguhan dan komitmen untuk mendaratkan tujuan pendidikan yang tercatat dalam UU Sisdiknas tahun 2003 pasal 4 ayat 1 sebagaimana yang ditegaskan oleh Choirul Mahfud bahwa,

¹⁴**Ujian Nasional: Kembalikan Kelulusan Siswa pada Sekolah**, <http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-1601.html>. 15/04/2010.

¹⁵**Siswa SMP Meninggal Usai Ujian Nasional**, <http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=4600&lang=.> 26/04/2010.

¹⁶ DinaSasti, dkk. **Menabur UN Menuai Gugatan**, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0607/03/nas06.html>. 03/07/2010.

¹⁷ Sri Lestari. **Ujian Nasional Dan Ujian Moral**, <http://jawabali.com/pendidikan/ujian-nasional-dan-ujian-moral-793/>. 27/04/2010.

¹⁸ PP No.19 Tahun 2005 tentang SNP pasal 25 ayat 4.

¹⁹ Moh. Yamin. **UN-UASBN, Makhluk Menakutkan**, <http://jawabali.com/pendidikan/un-uasbn-makhluk-menakutkan/> 22/04/2010.

Pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan dan budaya masyarakat secara menyeluruh, juga untuk memperbaiki dan kekurangan dan kegagalan, serta membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yang tercatat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003 pasal 4 ayat 1, yang berbunyi bahwa pendidikan nasional diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai-nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan multikultural juga didasarkan pada gagasan keadilan social dan persamaan hak dalam pendidikan. Pendidikan multicultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka (inklusif). Perubahan paradigma semacam ini membutuhkan dan menuntut transformasi yang tidak hanya terbatas pada dimensi kognitif belaka, lebih dari itu juga menuntut perubahan pada dimensi lainnya, yaitu afektif dan psikomotorik. Dengan demikian pendidikan bukan hanya sekedar mengajarkan “ini” dan “itu”, tetapi juga mendidik anak menjadi manusia berkebudayaan dan berperadaban. Itu berarti pendidikan sudah seharusnya dibangun kokoh pada aras realitas kebudayaan yang beragam (multikultural) tersebut.^{20 21}

Memang tidak mudah untuk membawa bangsa ini dengan sikap tulus dan jujur untuk menghayati Pancasila sebagai dasar Negara yang mengayomi keberagaman masyarakat di bangsa ini. Bahkan sudah sejak awal bangsa ini dibangun dan dihidupkan dengan semangat multikulturalisme yang melahirkan semangat Bhineka Tunggal Ika (*Unity in diversity*). Selanjutnya, apakah benar ditengah semangat multikulturalitas tersebut, justru kekuatan dominasi kekuasaan “bertengger” di puncak idealitas nilai yang dibangun bagi pencapaian kepentingan politik dan lain sebagainya. Seperti yang ditegaskan Michel Foucault, bahwa,

“Sebetulnya disetiap kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah mengandung kekuasaan tertentu yang bersifat represif untuk mengamankan kepentingannya. Ditegaskan pula bahwa, netralitas, independensi dan lain seterusnya yang digunakan sebagai alat melahirkan kebijakan yang betul-betul murni untuk kebaikan bersama demi pendidikan, tidak pernah ada.”²¹

Bukan menutup mata dan mengingkari kenyataan tersebut, namun, permasalahan-permasalahan yang tersebut di atas untuk sementara ini penulis tempatkan sebagai *warning* yang harus segera ditindaklanjuti, artinya bahwa

²⁰ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 17.

²¹Moh. Yamin, *Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*, (Jogjakarta: AR-RUZMEDIA, 2009) hlm. 53.

kenyataan ini harus menjadi otokritik mendalam bagi pelaksanaan pendidikan di bangsa ini yang berada pada wilayah permukaan dari dalamnya akar permasalahan yang ada. Bagi penulis hal yang paling mendesak untuk dibahas dalam tulisan ini adalah, membuka ruang berpikir yang lebih konstruktif menanggapi pola pendidikan yang dikerjakan atas bangsa ini, yang cenderung bahkan sudah terbukti melanggar hakikat dasariah manusia sebagai *homo potens*. Pada dasar keberadaan manusia sebagai *homo potens*, pendidikan harus menjawab bahwa, “selain sebagai mahluk spesifik yang dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan biologis, dalam kehidupannya manusia tidak hanya sepenuhnya diprogram oleh kemampuan biologisnya tersebut. Manusia memiliki kunikan dalam berbagai potensi dalam dirinya. Dalam potensinya tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertindak, manusia dinyatakan mempunyai *self-programming* yang menegaskan bahwa manusia memiliki berbagai potensi yang memampukan dirinya secara sadar mengerjakan tindakan terhadap dirinya dan lingkungannya.”²² Pendidikan sedapat mungkin harus diperjuangkan untuk didasarkan pada pemberdayaan manusia pada keunikannya dan dalam persatuannya dengan diri dan lingkungannya. Pendidikan harus menjawab manusia akan perbuatannya baik itu menyangkut keputusan bagi dirinya sendiri juga bagi orang lain atau masyarakat.

Menarik keterkaitannya pendidikan Kristen dengan semangat multikulturalisme di bangsa ini, bagaimana pendidikan Kristen menegaskan diri pada posisi yang sama. Artinya bahwa, apakah pendidikan Kristen yang dibangun di bangsa ini sungguh didasari nilai-nilai multikulturalisme? Robert W. Pazmino menegaskan bahwa pengajaran Yesus justru sangat bersifat multikultural, dicatatkan bahwa, “Yesus meruntuhkan tembok pemisah yang memisahkan wanita,

²²H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2009) hlm. 136.

anak-anak, orang-orang berdosa, dan orang kafir dengan sebuah pengalaman baru yang asalnya dari Allah".²³

Pada awal abad masehi, Palestina dipengaruhi oleh Yunani, Babcl, Siria, Asur, Mesir, Roma, dan Palestina sendiri. Sebagai seorang Yahudi, Yesus menggunakan tiga bahasa: Aram sebagai bahasa percakapan sehari-hari, Ibrani sebagai bahasa kultus, dan bahasa Yunani digunakan dalam pertukangan. Budaya dan bahasa ini sangat berpengaruh pada pengajaranNya. Walaupun demikian Ia mengikuti tradisi Yahudi sehingga Ia disebut sebagai Rabbi oleh Nikodemus. Ia berjumpa dengan kelompok masyarakat yang berbeda. Galilea adalah tempat pertemuan orang-orang non Yahudi dan orang asing lainnya. Bahasa utama dalah Yunani Koine, sementara orang Yahudi menggunakan bahasa Aram. Pazmino mengatakan bahwa lebih banyak dari pengajaran Yesus ditujukan pada disampaikan pada konteks Galilea. Ia menyampaikan pengajaran yang segar dan kemerdekaan berpikir yang mana cocok untuk orang Galilea yang majemuk, walau tidak cocok pada orang Yudea.²⁴

Hal inilah yang menjadi fokus kajian penelitian, yaitu sejauhmana ajaran iman Kristen yang difokuskan pada Yesus sebagai Guru Agung membangun dan mengimplementasikan pendidikan berbasis multikultural di berbagai dimensi kehidupan baik pribadi-Nya maupun dalam kehidupan murid-murid-Nya. Disamping itu, penelitian juga berupaya melihat dari dekat tentang pengimplementasian pendidikan multikultural di beberapa Sekolah Menengah Atas Kristen di Makassar sebagai sebuah studi pengetahuan dan perbandingan tentang sejauhmana pendidikan multikultural tersebut dikerjakan, apa konsekuensinya serta dampak positifnya.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan kenyataan pergumulan pendidikan di Indonesia tersebut, tanggung jawab yang sekarang diperhadapkan kepada insan-insan negeri ini, adalah bagaimana membangun kembali hakikat pendidikan tersebut bukan pada kepentingan golongan dan kekuasaan tetapi menempatkan pada kehakikiannya sebagai pembangun

²³ Robert W. Pazmiflo, *God Our Teacher, Basic Theologicalfor Christian Education*, (Eugene, OR: Wipf & Stock, 2002), 40.

²⁴ Robert W. Pazmifio, *Op.cit.* p. 45.

kesadaran kritis terhadap berbagai keberadaan manusia. Dengan pendidikan, manusia dibangun potensinya untuk mengembalikan kemanusiaan manusia tanggap dan kritis terhadap berbagai hal demi kebebasan dari dehumanisasi karena eksploitasi, hegemoni maupun dominasi, yang pada hakikatnya adalah wajah pendidikan yang tidak manusiawi, tidak etis, yang tidak membela dan menghargai manusia yang justru adalah subyek dari pendidikan tersebut, yang tidak berpijak pada pembangunan mentalitas kritis terhadap perbaikan dan perubahan nilai-nilai kehidupan dan budaya atau kultur yang ada. Maka dari itu, untuk menjawab latar belakang masalah tersebut beberapa rumusan masalah dapat disejajarkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah wujud penerapan Pendidikan Multikultural sekarang ini di sekolah-sekolah SMU Kristen di Kota Makassar dalam Konteks Indonesia yang plural bercermin dari pemikiran Pazmino tentang konsep pendidikan multikultural Yesus?
2. Bagaimanakah seharusnya Pendidikan Multikultural tersebut diterapkan dalam pendidikan Kristen, khususnya menyoroti relasi guru dan murid di Sekolah dalam konteks Indonesia berdasarkan paradigma pendidikan multikultural Yesus?

C. Fokus Penelitian

Demi terarah dan terstrukturnya penelitian ini, maka sebagai sebuah studi pengetahuan pendidikan multikultural, peneliti menfokuskan penelitian ini pada refleksi iman Kristen yang difokuskan pada Yesus sebagai Guru Agung membangun dan mengimplementasikan pendidikan berbasis multikultural di berbagai dimensi kehidupan baik pribadi-Nya maupun dalam kehidupan murid-muridNya. Disamping itu, sebagai sebuah studi perbandingan, peneliti juga berupaya melihat dari dekat tentang pengimplementasian pendidikan multikultural di beberapa sekolah SMA Krite

di Makassar, tentang sejauhmana pendidikan multikultural tersebut dikerjakan, apa konsekuensinya serta dampak positifnya.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan adalah di beberapa Sekolah Menengah Umum Kristen di kota Makassar. Pemilihan lokasi ini sangat memperhitungkan kota Makassar sebagai pusat pendidikan, niaga, gaya hidup untuk Indonesia Timur. Diprediksi bahwa kota Makassar dengan sendirinya menjadi keutuhan komunitas kecil dari Indonesia. Di Kota Makassar berbagai suku, agama dan kebudayaan bertemu dalam berbagai nilai-nilai kehidupan dan kebutuhan hidup, sehingga sangat tepat mewakili kondisi multikulturalitas yang diharapkan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pendidikan multikultural dibangun serta signifikansi terhadap kemajuan pendidikan, khususnya menyoal relasi guru dan murid di sekolah, yaitu di beberapa sekolah-sekolah SMU Kristen di kota Makassar, menyikapi ajaran iman Kristen tentang pendidikan multikultural berdasarkan ajaran Yesus dalam pemikiran Robert W. Pazmino.
2. Memperhatikan secara serius hal-hal yang harus kembangkan dalam pendidikan Kristen tentang pendidikan multikultural yang menyangkut tranformasi diri dan tranformasi proses belajar mengajar di sekolah SMA Kristen di Makassar dalam konteks Indonesia yang majemuk.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang signifikan terutama bagi:

1. Pemerintah dan pihak terkait pada khususnya, agar meningkatkan kesadaran pendidikan multikultural di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur agar pendidikan mengedepankan semangat pluralitas sehingga tidak terjadi ketegangan yang mengarah pada konflik SARA.
2. Komunitas pembelajar dan pelaksana pendidikan di kota Makassar agar semakin sadar bahwa pendidikan di Indonesia, dimanapun dibelahan bumi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai multikulturalitasnya.
3. Bagi STAKN Toraja sebagai Instansi Pendidikan Tinggi Agama Kristen yang membiayai penelitian ini guna mendapatkan kajian-kajian yang akurat tentang pendidikan multikultural dalam bingkai iman Kristen sebagai dasar pengimplemtasian pendidikan dan sumber belajar di Kampus, dan bagi pendewasaan arah Pendidikan Agama Kristen di Indonesia
4. Peneliti lainnya, supaya menjadi referensi awal yang ingin mengkaji secara tuntas mengenai pendidikan multicultural dalam tataran iman Kristen.

G. Batasan Penelitian

Penelitian ini mengusung studi pedagogis transformatif dalam membahas mengenai pendidikan multikultural. Menurut Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis tranformasi, yakni: (1) transformasi diri, (2) tranformasi sekolah dan proses belajar mengajar dan (3) tranformasi masyarakat.²⁵

Maka dari itu, penelitian ini hanya membatasi diri pada dua lingkup transformasi yang dibangun melalau pendidikan multikultural yaitu pada lingkup **tranformasi diri dan transformasi proses belajar mengajar.**

²⁵ Lihat: Paul Gorski, *Six Crltical Paradigm Shiifd for Multicultural education and The Question we Should be Asktng*, dalam www.Edchange.org/multicultural. Lihat kutipan oleh Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 15.

Yang pertama pendidikan sebagai proses transformasi diri dan pembentukan kepribadian. Dalam hal ini pendidikan multikultural diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Dalam hal pewarisan budaya, pendidikan tidak semata-mata mengekalkan budaya secara estafet, tetapi menyiapkan suatu masa depan pendidikan yang potensial untuk hari esok, yang menuntut banyak persyaratan baru yang tidak pernah diduga sebelumnya dan sebagian besar malah masih berupa teka-teki.²⁶ Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik, terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan dan sistemik oleh karena berlangsung dalam semua situasi kondisi, di semua lingkungan yang saling mengisi (lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat).²⁷ Kedua pendidikan sebagai transformasi proses belajar mengajar. Dalam konteks ini pendidikan multikultural merupakan pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan dan budaya masyarakat secara menyeluruh, juga untuk memperbaiki kekurangan dan kegagalan serta membongkar praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan."²⁸ Mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), khususnya pasal 4 ayat 1, pendidikan multikultural telah menjawab harapan pendidikan nasional yang diselenggarakan **secara demokratis dan berkeadilan** serta **tidak diskriminatif** dengan **menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.**²⁹ Pendidikan multikultural memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial, penuh prasangka dan diskriminatif ke

²⁶ Ibid., 34.

²⁷ Ibid.,

²⁸Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 16.

²⁹ Ibid.,

perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka (inklusif). Perubahan paradigma tersebut menuntut transformasi tidak hanya terbatas pada dimensi kognitif, lebih dari itu juga menuntut perubahan pada dimensi lainnya, dimensi afektif dan psikomotorik.³⁰

Untuk menjawab tantangan pendidikan multikultural pada lingkup transformasi diri dan dalam proses belajar mengajar yang melibatkan hubungan guru dan murid di sekolah, maka untuk kajian pengetahuan pendidikan multikultural menggali prinsip-prinsip dasar pendidikan multikultural Yesus berdasarkan pemikiran Robert W. Pasmimo, yang kemudian akan dibangun kecakapan-kecakapan dasar implementasinya dalam pendidikan Kristen di sekolah.

Untuk itu penelitian ini hanya mengambil lokasi di kota Makassar, yaitu di beberapa sekolah SMU Kristen di kota Makassar. Alasan pengambilan populasi ini telah dijelaskan pada bagian lokasi penelitian, sedangkan pengambilan sampel yang mengacu pada beberapa SMU Kristen di kota Makassar dititikberatkan karena siswa-siswi sekolah SMU diprediksi telah sadar dan mengetahui makna kemajemukan serta mampu membangun diri dalam relasi kemajemukan sehingga upaya penerapan pendidikan bernuansa kemajemukan kemungkinan besar dapat diteliti dengan jelas.

H. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini mengungkap topik pendidikan multikultural, yaitu mengacu pada pendidikan multikulturalis Yesus. Tujuannya adalah menemukan nilai-nilai inklusifitas pendidikan Kristen yang dibangun oleh Yesus. Hal ini menjadi dasar untuk menjawab pergumulan tentang bagaimana sesungguhnya pendidikan Kristen

³⁰ Ibid., 17

sehubungan dengan maraknya isu pendidikan multikultural di bangsa ini yang kembali dikobarkan setelah tumbangya pemerintahan Orde Baru.

Secara khusus penelitian ini ingin menyoroti beberapa hal yaitu:

1. Upaya menjawab tantangan pluralitas yang menjadi wadah dimana pendidikan Kristen juga dikerjakan di bangsa ini.
2. Menegaskan bahwa pendidikan multikultural sesungguhnya jauh sebelumnya telah dikerjakan oleh Yesus pada zamanNya, baik secara pribadi maupun dan dalam relasiNya dengan murid-muridNya.
3. Menegaskan bahwa kekristenan sangat mendukung keutuhan dari pendidikan multikultural yang kembali dikobarkan di bangsa ini.
4. Menjawab tantangan ini, melalui penelitian ini, akan diupayakan sebuah kajian yang menjawab kondisi yang sesungguhnya dari pelaksanaan pendidikan multikultural di bangsa ini, sehingga akan ada dasar untuk mengerjakan upaya revitalisasi pendidikan multikultural baik secara menyeluruh, khususnya dalam penelitian dibatasi pada konsep multikultural pada tranformasi diri dan proses belajar mengajar di sekolah dalam bingkai pendidikan Kristen. Sehingga pendidikan Kristen senantiasa mengerjakan nilai-nilai transformatifnya dalam bingkai yang konstruktif memaknai kemajemukan yang ada di bangsa ini.